

TANOAR
JURNAL ILMU-ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA
ISSN 1412-6338

Volume 5, Nomor 2 Desember 2007

*Kajian Tentang Pelaksanaan Sasi di Negeri Lilibooi,
Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengah
Effina Kissiya dan Bety D. S. Hetharion*

*Analisis interpretasi Fonem Segmental dan Suprasegmental
Mahasiswa Program Studi Pendidikan Bahasa Jerman
Wilma Akihary dan Ritha Maruanaya*

*Sintesis 3, 4-Metilendioksifenil Etil Maleat sebagai Turunan
Antibiotic C-9154 Baru dari Minyak Kulit Lawang
Heatly Kainama dan Eirene Grace Fransina*

*Analisis Pelaporan Keuangan Sektor Publik dan Kinerja,
Transparansi Serta Akuntabilitas Publik
Theresia F. Sitanala dan Adonis A. Batkunde*

*Profil Migran Non Permanen Pekerja Sektor Informal Daerah
Padat Hunian di Kota Ambon
Prapti Murwani*

*Pengelolaan Raskin (Suatu Tujuan Terhadap Kineja Birokrasi)
Ferry Wattimury*

*Peranan Wanita Terhadap Status Gizi Balita Pasca Konflik di
Desa Passo Kecamatan BAGuala Kota Ambon
Sintje Liline, Johanis Rehena dan Prelly Tuapattinaya*

*Pengawasan atas Peredaran Produk Makanan Kamasan
Dikaitkan dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen
Teng Berlianty*

Lembaga Penelitian Universitas Pattimura

**ANALISIS PELAPORAN KEUANGAN SEKTOR PUBLIK DAN KINERJA,
TRANSPARANSI SERTA AKUNTABILITAS PUBLIK
(Studi kasus pada Pemerintah Daerah Propinsi Maluku
dan Pemerintah Kota Ambon)
Theresia F. Sitanala dan Adonia A. Batkunde
ABSTRACT**

Especial target of autonomous execution and decentralization fiscal is create the good governance. Good governance marked with transparency, accountability public, participate, efficiency and effectivity and also the straightening of law. Therefore, strive to realize the good governance is by improving performance, transparency and akuntabilitas in public finance management. Autonomy area also result the importance correction of accounting system of finance area and management of finance area. This correction represent the effort fulfill the demand of accountability public, transparency of local government for public finance management. Variable measurement use the instrument by 30 question item closed. To test the data quality from result of spreading questioner by a validity test using faotor loading and reliabilitas by using cronbach alpha, and analyse the data by using comparison test, test the mean, and t test. Assessment mount the performance measurement, transparency and akuntabilitas public of Local Government by executive, legislative and auditor obtained by result that storey; level of performance measurement, transparency and accountability public from Local Government as organizer of finance public very high or can be told very good

Keywords: Performance, Transparancy, Accountability Public

PENDAHULUAN

Masalah . kinerja, transparansi dan akuntabilitas publik di Indonesia merupakan masalah penting sejak dilaksanakannya otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Tujuan utama pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal adalah menciptakan good governance, yaitu pemerintahan yang baik dan ditandai dengan transparansi, akuntabilitas publik, partisipasi, efisiensi dan efektivitas serta penegakan hukum. Oleh karena itu, upaya untuk mewujudkan good governance adalah dengan meningkatkan kinerja, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan public.

Pemerintahan yang transparan dan akuntabel adalah suatu pemerintahan yang menyediakan segala informasi atau peristiwa penting kegiatan pemerintahan untuk terekam dengan baik dalam suatu ukuran-ukuran yang jelas dan dapat diikhtisarkan melalui proses akuntansi ke dalam bentuk suatu laporan keuangan agar terlihat segala hal yang terjadi dan terdapat di ruang entitas yaitu pemerintahan daerah.

Otonomi daerah juga mengakibatkan perlunya pembenahan sistem akuntansi keuangan daerah dan manajemen keuangan daerah. Pembenahan ini merupakan upaya memenuhi tuntutan transparansi dan akuntabilitas publik pemerintah daerah atas pengelolaan keuangan publik.

Dalam Peraturan Pemerintah No 58 Tahun 2005 pasal 100, Pemerintah Daerah diwajibkan untuk menyajikan pelaporan keuangan yang terdiri atas Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan 'Keuangan. Ada beberapa alasan bahwa pemerintah daerah perlu membuat laporan keuangan.

Dari sisi internal, laporan keuangan merupakan alat pengendalian dan evaluasi kinerja pemerintah dan unit kerja pemerintah daerah. Laporan keuangan bagi pihak internal merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban internal (internal accountability) yaitu pertanggungjawaban yang dilakukan oleh pengelola keuangan daerah kepada pihak-pihak yang memiliki akses lebih mudah seperti lembaga daerah, manajer publik, dan pegawai pemerintah. Pada sisi eksternal, laporan keuangan merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban eksternal (external accountability) yaitu pertanggungjawaban yang dilakukan oleh pengelola keuangan daerah kepada masyarakat pengguna jasa 'publik, masyarakat pembayar pajak, organisasi yang menggunakan pelayanan publik sebagai input aktivitas organisasinya, bank serta investor.

Akuntabilitas publik merupakan pemberian informasi dan pengungkapan' atas aktivitas dan kinerja financial organisasi sektor publik kepada pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholders). Informasi perlu dilaporkan karena lembaga publik harus bisa menjadi subjek pemberi informasi dalam upaya memenuhi hak-hak publik yaitu hak untuk tahu, (right to know), hak untuk diberi informasi (right to be kept informed), dan hak untuk didengar aspirasinya (right to be heard and to be listened to).

Dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 akuntabilitas baru sebatas pengaturan kelembagaan (siapa yang bertanggung jawab kepada siapa), dalam hal ini Pemerintah Daerah sebagai single entity dan DPRD sebagai shareholder. Sehingga masih membutuhkan pengaturan berkaitan dengan a) detailed reporting entity, b) financial report or statement, c) measurement method, d) performance criteria.

Transparansi dapat diartikan sebagai keterbukaan (openness)

organisasi sektor publik dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi

Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka yang menjadi permasalahan adalah apakah pelaporan keuangan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 pasal 100, seperti Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan dapat memperlihatkan kinerja, transparansi dan akuntabilitas organisasi sektor publik serta perwujudan good governance dan apakah informasi yang disampaikan sudah memenuhi kebutuhan informasi dari stakeholders.

Pelaporan Keuangan Sektor Publik

Laporan Keuangan merupakan sarana pengkomunikasian informasi keuangan utama kepada pihak-pihak di dalam dan di luar entitas pemerintahan. Laporan ini menginformasikan transaksi yang dilakukan dan dikuantifikasikan dalam nilai moneter. Tujuan laporan keuangan dibuat dan disajikan serta diinformasikan oleh pengelola keuangan adalah sebagai wujud pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan. Pelaporan Keuangan menyajikan informasi Keuangan selama satu periode yang digunakan oleh pengelola keuangan sebagai landasan untuk pengambilan keputusan.

Sektor publik dapat diartikan sebagai pemerintahan dan unit-unit organisasinya, yaitu unit-unit yang dikelola oleh pemerintah dan memeberikan pelayanan kepada masyarakat seperti kesehatan,

pendidikan dan keamanan (Abdullah, 1996).

Secara kelembagaan domain sektor publik antara lain meliputi badan-badan pemerintah (Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah), perusahaan milik negara (BUMN), perusahaan milik daerah (BUMD), yayasan, organisasi publik dan organisasi masa, lembaga swadaya masyarakat (LSM), universitas dan organisasi non profit lainnya.

Dalam buku *Governmental Accounting, Auditing, and Financial Reporting* yang disusun oleh American Accounting Association (AAA, 1972), dikemukakan bahwa untuk dapat memahami pelaporan keuangan pemerintah dengan tepat perlu mempertimbangkan tiga hal yaitu: I . Struktur Pemerintah, diperlukan untuk

melindungi dan melayani kebutuhan warganya.

Pada pemerintahan yang demokratis biasanya dilakukan pemisahan fungsi antara eksekutif,

legislatif, dan yudikatif untuk memudahkan

check and balance. Ketiga kelompok ini bisa

mempunyai kesimpulan yang berbeda

mengenai bagaimana warga negara dilindungi

dan dilayani. Dalam hal ini keberhasilan

pemerintah diukur dengan pelayanan dan

efisiensi dalam penggunaan sumber daya yang dimilikinya.

2. Sifat sumber daya, yaitu terdapat hubungan

antara barang/jasa yang diberikan dengan harga

yang harus dibayar. Pada pemerintahan, hal

seperti ini tidak ada dan sulit mengidentifikasi

hubungan antara pajak yang dibayarkan warga

masyarakat dengan jasa yang diterimanya

secara proporsional.

3. Proses Politik, dalam hal ini politik berperan

penting dalam negara demokrasi. Rakyat

melalui wakil-wakilnya dapat mempengaruhi

dan menekan Pemerintah agar memberikan jasa

maLsimum dengan , pembayaran pajak • wmm minimum,

termasuk dalam hal penyediaan \$mliuas-fasilitas umum.

,Intenrational Public Sector Accounting _jk=&rnis dalam Bastian

(2001) mengemukakan bainw-a pelaporan keuangan sektor publik

terdiri dan: 1) Laporan Posisi Keuangan, 2) Laporan <merja Keuangan, 3)

Laporan Perubahan Aktiva 3ersihlEkuitas, 4) Laporan arus Kas,

dan 5) Kebijakan Akuntansi dan catatan atas Laporan Keuangan.

Pemakai Laporan Keuangan Sektor Publik

Governmental Accounting Standard Board

G A.SB} dalam Mardiasmo (2002) mengidentifikasi bahwa pernahai

laporan keuangan sektor publik terdiri dari masyarakat, ' :.saslatif dan badan pengawasnya serta investor/ :jeditor.

Drebin et. Al. (1981) dalarn penelitiannya :nengidentifikasi sepuluh

kelompok pemakai laporan keuangan yang terdiri dari 1) pembayar pajak, 2)

pemberi dana bantuan, 3) investor, 4) pengguna jasa, 5) karyawan/pegawai, 6)

pemasok, ') dewan legislatif, 8) manajemen, 9) pemilik, dan 10) badan

pengawas.

Kebutuhan informasi pemakai laporan keuangan sektor publik

menurut Hanley (1992), Bergonovi dan Pessia (1997) dalam Mahmudi (2002)

dapat disimpulkan bahwa:

I . Masyarakat 'pengguna pelayanan publik membutuhkan informasi atas

- biaya, harga, dan kuantitas pelayanan yang diberikan.
2. Masyarakat pembayar pajak dan pemberi bantuan ingin mengetahui keberadaan dan penggunaan dana yang telah diberikan. Publik ingin mengetahui apakah pemerintah melakukan ketaatan fiscal dan ketaatan peraturan perundang-undangan atas pengeluaran yang dilakukan.
 3. Kreditor dan investor membutuhkan informasi untuk menghitung tingkat risiko, likuiditas dan solvabilitas.
 4. Parlemen dan kelompok politik memerlukan informasi keuangan untuk melakukan fungsi pengawasan, mencegah terjadinya laporan yang bias atas kondisi keuangan Pemerintah dan penyelewengan keuangan daerah.
 5. Manajer publik membutuhkan informasi akuntansi sebagai komponen sistem informasi untuk membantu perencanaan dan pengendalian organisasi, pengukuran kinerja dan membandingkan kinerja organisasi antar waktu dan dengan organisasi lainnya yang sejenis.
 6. Pegawai membutuhkan informasi atas gaji dan manajemen kompensasi yang akan diperolehnya.

Karakteristik Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah

Menurut Bastian (2001), pelaporan keuangan Pemerintah Daerah harus memenuhi karakteristik kualitatif pelaporan keuangan seperti dapat dipahaminya, relevan, andal, dan dapat diperbandingkan. Sejalan dengan ini Craner dan Joner (1990) mengemukakan karakteristik pelaporan keuangan Pemerintah Daerah meliputi: 1) Relevan yaitu informasi yang disajikan dalam pelaporan keuangan harus relevan dengan proses pengambilan keputusan, 2) Andal, yaitu informasi

yang disajikan harus jujur, netral, lengkap dan bebas dari kesalahan material yang menyesatkan, 3) Dapat diperbandingkan yaitu pembaca dapat memperbandingkan laporan keuangan entitas guna mengevaluasi posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan secara relatif, dan 4) Tepat waktu yaitu laporan keuangan hendaknya tidak mengalami penundaan karena apapun karena suatu penundaan akan menyebabkan informasi yang disajikan tidak lagi relevan dengan kebutuhan.

Akuntabilitas Publik dan Transparansi

Candler dan Plano (1994) mengartikan akuntabilitas sebagai institusi check and balance dalam sistem administrasi. Akuntabilitas berarti menyelenggarakan perhitungan terhadap sumber daya atau kewenangan yang digunakan.

Menurut Oxford Advance Learner's Dictionary (1989) dalam Lembaga Administrasi Negara (LAN, 2000), akuntabilitas adalah *required or expected to give an explanation for one's action*.

Berdasarkan pandangan di atas maka akuntabilitas terkandung kewajiban untuk memberikan keterangan atau laporan terhadap tindakan yang telah dilakukan kepada pemberi mandat. Media pertanggungjawaban dalam konsep akuntabilitas tidak terbatas pada laporan pertanggungjawaban saja, namun mencakup

praktik-praktik kemudahan siii pemberi mandat untuk mendapatkan informasi baik langsung maupun tidak langsung secara lisan maupun tulisan, sehingga akuntabilitas akan tumbuh pesat pada lingkungan yang mengutamakan keterbukaan sebagai landasan pertanggungjawaban.

Akuntabilitas Publik yang harus dilakukan oleh organisasi sektor publik terdiri dari beberapa aspek (Elwood, 1993; dan Mahmudi, 2002) yaitu:

1. Akuntabilitas Hukum dan kejujuran adalah pertanggungjawaban lembaga publik untuk berperilaku jujur dalam bekerja dan menaati ketentuan hukum yang berlaku.
2. Akuntabilitas Manajerial adalah pertanggung jawaban lembaga publik untuk melakukan pengelolaan organisasi secara efisien dan efektif. Inefisiensi lembaga publik menjadi tanggungjawab lembaga yang bersangkutan.
3. Akuntabilitas Program berhubungan dengan pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai atau tidak, dan apakah telah mempertimbangkan alternatif program yang memberikan hasil dengan biaya yang minimal.
4. Akuntabilitas kebijakan berhubungan dengan lembaga publik atas kebijakan-kebijakan yang diambilnya. •
5. Akuntabilitas Finansial adalah pertanggung jawaban lembaga-lembaga publik dalam menggunakan uang publik secara ekonomi, efisien dan efektif, tidak ada pemborosan dan kebocoran dana serta korupsi.

Transparansi adalah prinsip yang menjatnin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan yaitu informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya serta hasilhasil yang dicapai (Bapenas & Depdagri, 2002).

Menurut Siregar (2001), transparansi mengandung prinsip yaitu 1) mudah dipahami oleh masyarakat, 2) dapat diterima oleh masyarakat, dan 3) dikelola secara terbuka dan dipertanggung jawabkan.

Pemerintah dikatakan transparan

- jika pemerintah (Kumiawan, 2003):
- 1). Melakukan pertanggungjawaban secara rutin kepada rakyat/wakil rakyat mengenai pelaksanaan tugas-tugasnya.
 - 2). Jika pemerintah dengan sukarela memberikan infonnasi seluas-luasnya tentang kinerja baik itu masalah pelayanan kepada rakyat maupun masalah pengelolaan keuangan, dan
 - 3). Jika pemerintah dengan terbuka selalu mengadakan dialog dengan rakyatnya baik secara rutin maupun insidental mengenai seluruh produk kebijakan yang telah dibuat dan dilaksanakan.

Konsep Pengukuran Kinerja

Whittaker (1993) dalam bukunya *The Governrment Performance Result Act of 1993* menyebutkan bahwa pengukuran kinerja merupakan suatu alat manajemen yang digunakan untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas. Pengukuran kinerja juga digunakan untuk menilai pencapaian tujuan dan sasaran.

Dalam *Reference Guide (1996)* yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Alberta, Canada menyatakan bahwa pengukuran kinerja merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Terlepas dari besar, jenis, sektor atau spesialisasinya maka setiap organisasi cenderung pada pengukuran kinerja yang meliputi aspek: 1) Finansial yaitu anggaran rutin dan pembangunan dari instansi pemerintah, 2) Kepuasan Pelanggan, 3) Operasi Bisnis Internal, 4) Kepuasan Pegawai, 5) Kepuasan Komunitas dan shareholders/stakeholders, dan 6) waktu.

METODE
PENELITIAN

Populasi dan

Sampel

Populasi penelitian ini adalah populasi stakeholder organisasi sektor publik yang berada di masing-masing wilayah Pemerintah Daerah Tingkat Dua di Propinsi Maluku dan Pemerintah Kota Ambon, sedangkan sampel adalah pihak eksekutif, pihak legislatif, dan auditor.

Teknik Pengukuran Variabel

Pengukuran variabel menggunakan instrumen berbentuk pernyataan tertutup (closed ended statement). Instrumen berjumlah 30 item pertanyaan yang merupakan pengembangan dari penelitian

sebelumnya berhubungan dengan informasi yang harus disajikan dalam pelaporan keuangan Pemerintah Daerah dan , diukur dengan menggunakan skala Likert. Responden diminta memberikan jawaban dalam lima tingkat persetujuan, dan masing-masing pilihan jawaban menunjukkan tingkat responsif responden terhadap sejumlah pertanyaan yang diajukan. Semua pernyataan yang diajukan bersifat pernyataan positif.

Teknik Pengembangan Instrumen

Penelitian ini menggunakan instrumen yang dikembangkan oleh Drebin et., al.,(1981) tentang pemakai laporan keuangan (user) dan keinginan pemakai (user needs) pelaporan keuangan sektor publik.

Penelitian terdahulu mendasarkan keinginan pemakai pada tujuan pelaporan keuangan sektor publik yaitu menyediakan informasi yang bermanfaat untuk menilai dan memprediksi:

1. Kesehatan keuangan.
2. Kondisi perekonomian.
3. Kepatuhan hukum.
4. Kinerja operasional.
5. Perencanaan dan anggaran.

Instrumen ini dikembangkan menjadi 30 pernyataan dan digunakan dalam penelitian ini.

Analisis Data

Untuk menguji kualitas data dari hasil penyebaran kuesioner akan dilakukan uji validitas dengan menggunakan, factor loading dan reliabilitas dengan menggunakan cronbach alpha, dan analisis data dilakukan dengan menggunakan uji perbandingan, uji rata-rata, dan uji t. Uji perbandingan dilakukan dengan cara memperbandingkan pelaporan keuangan yang diterbitkan Pemerintah Daerah dengan ketentuan Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Uji rata-rata dilakukan untuk melihat tingkat kinerja, transparansi dan akuntabilitas dari Pemerintah Daerah. Pengujian dilakukan dengan melihat skor terkecil dan skor terbesar serta rentang skor skala dibagi dengan enam satuan deviasi standar yang merupakan estimasi besarnya satuan deviasi standar populasi yang digunakan untuk membuat kategori normatif skor subyek (Azwar, 2004).

Uji t dimaksudkan untuk melihat apakah ada perbedaan rata-rata skor kebutuhan informasi yang disampaikan oleh pihak eksekutif sebagai pihak yang menerbitkan pelaporan keuangan dengan kebutuhan informasi yang diterima oleh pihak legislatif dan pihak auditor. Waktu dan Lokasi Penelitian

, Penelitian ini dilakukan di Kota Ambon dan telah berlangsung selama 3 (tiga) bulan, mulai Juli sampai dengan September 2007. Penelitian ini telah melalui tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap penyusunan laporan kemajuan tengah dan tahap penyusunan laporan akhir.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengujian Validitas dan Reliabilitas

Uji validitas dengan menggunakan factor loading menunjukkan hasil

sebagai berikut: Variabel pengukuran kinerja dengan skor total berkisar 0,546 - 0,887; variabel transparansi dan akuntabilitas public dengan skor total berkisar 0,537 - 0,896; dan variabel kebutuhan informasi dengan skor total berkisar 0,611 - 0,852. Semua variabel diukur pada tingkat signifikansi 0,05.

Uji reliabilitas dengan koefisien cronbach alpha menunjukkan bahwa variabel pengukuran kinerja sebesar 0,797; variabel transparansi dan akuntabilitas publik sebesar 0,768; dan variabel kebutuhan informasi sebesar 0,820. Semua variabel diukur pada tingkat signifikansi 0,05.

Hasil pengujian validitas dan reliabilitas yang telah dilakukan menunjukkan konstruk-konstruk dari variabel penelitian cukup andal dan sah untuk digunakan dalam analisis yaitu factor loading yang rata-rata lebih besar dari 0,30 dan koefisien alpha yang lebih besar dari 0,50.

Pengujian Data

Uji Perbandingan dan Uji Rata-Rata (Means)

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang telah dilakukan oleh Drebin et al., (1981) namun dengan sampel dan obyek penelitian yang berbeda. Kuesioner yang disebar sebanyak 105 , eksemplar dan yang berhasil dikumpulkan sebanyak 79 eksemplar sedangkan data yang layak untuk dianalisis sebanyak 76 kuesioner, 3 kuesioner tidak layak untuk digunakan karena tidak lengkap.

Untuk menjawab rumusan masalah pertama tentang kesesuaian pelaporan keuangan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah, maka Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah harus mengungkapkan:

- a. Secara wajar dan menyeluruh dari kegiatan Pemerintah ' Daerah, pencapaian kinerja keuangan

daerah dan pemanfaatan sumber daya ekonomi serta ketaatan terhadap peraturan perundang-uridangan;

- b. Perbandingan antara realisasi dan anggaran serta penyebab terjadinya selisih antara realisasi dengan anggarannya.
- c. Konsistensi penyusunan °- laporan keuangan antara satu periode akuntansi dengan periode akuntansi sebelumnya;
- d. Perubahan kebijakan akuntansi yang diterapkan;
- e. Transaksi atau kejadian penting yang teijadi setelah tanggal tutup buku mempengaruhi kondisi keuangan dan ;
- f. Catatan-catatan terhadap isi laporan keuangan dan informasi tambahan lainnya yang diperlukan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari pelaporan keuangan.

Temyata dari observasi yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa pelaporan keuangan yang dibuat oleh Pemerintah Daerah sudah sesuai ketentuan yang menjadi acuan dalam penyusunan pelaporan keuangan baik mengenai prosedur maupun format pelaporannya.,

Hasil pengujian rata-rata dengan melihat skor terkecil dan skor terbesar serta rentang skor skala dibagi dengan enam satuan deviasi standar yang merupakan estimasi besarnya satuan deviasi standar populasi yang digunakan untuk membuat kategori normatif skor subyek (Azwar, 2004), menunjukkan bahwa pihak eksekutif (ditandai stakeholder 1, 0 pada hasil print out) menilai tingkat pengukuran kinerja dan transparansi dan akuntabilitas publik serta kebutuhan informasi sangat tinggi dibanding pihak legislatif dan pihak auditor (ditandai stakeholder 2,0. pada hasil print out). Hal ini dilihat daii nilai mean yang dicapai oleh pihak eksekutif lebih besar dibanding pihak legislatif dan auditor yaitu

pengukuran kinerja sebesar 44,235 (dibanding 40,286) dan transparansi dan akuntabilitas publik sebesar 45,000, (dibanding 40,952). Namun dari skor terbesar dan terkecil serta rentang skor skala dibagi enam satuan deviasi standar, kedua kelompok ini termasuk dalam kelompok sangat tinggi. Ini berarti bahwa walaupun terdapat sedikit perbedaan penilaian antara pihak eksekutif dan pihak legislatif dan auditor, keduanya menilai tingkat pengukuran kinerja, transparansi dan akuntabilitas publik dari Pemerintah Daerah sebagai pengelola keuangan publik sangat tinggi atau dapat dikatakan sudah sangat baik.

Uji T

Hasil pengujian ini menunjukkan bahwa kebutuhan informasi untuk pihak eksekutif sebagai pihak yang menerbitkan pelaporan keuangan rata-rata, lebih besar dibanding pihak legislatif dan auditor sebagai pihak yang menerima pelaporan keuangan tersebut. Hal ini dapat dilihat pada tabel pertama uji t yang menunjukkan mean stakeholder 1,0 yaitu pihak eksekutif sebesar 44,265 dan mean stakeholder 2,0 yaitu pihak legislatif dan auditor sebesar 41,095.

Hasil pengujian t pada tabel kedua menunjukkan F hitung untuk pihak eksekutif dengan equal variance assumed (diasumsi kedua varians sama) adalah 2,947 dengan probabilitas 0,090. Karena probabilitas $> 0,05$ maka H_0 diterima, atau tidak ada perbedaan antara kedua kelompok, artinya kedua kelompok tersebut yaitu pihak eksekutif dan pihak legislatif dan auditor sama-sama mengharapkan adanya pengukuran kinerja, dan transparansi serta akuntabilitas publik. Sedangkan dengan dasar equal variance not assumed (diasumsi kedua varians tidak sama) adalah 3,078 dengan probabilitas 0,003. Karena probabilitas $< 0,05$ maka H_0 ditolak,

atau ada perbedaan antara kedua kelompok, artinya ada perbedaan yang nyata di antara pihak eksekutif dan legislatif dan auditor yaitu pihak eksekutif sebagai pihak yang menerbitkan pelaporan keuangan memiliki rata-rata kebutuhan informasi yang lebih tinggi dibanding pihak legislatif dan auditor sebagai pihak yang menerima pelaporan keuangan.

KESIMPULAN DAN SARAN Kesimpulan

Berdasar hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pelaporan keuangan yang dibuat oleh Pemerintah Daerah sudah sesuai ketentuan yang menjadi acuan dalam penyusunan pelaporan keuangan baik mengenai prosedur maupun formal pelaporannya. Terdapat sedikit perbedaan penilaian antara pihak eksekutif dan pihak legislatif dan auditor, keduanya menilai tingkat pengukuran kinerja, transparansi dan akuntabilitas publik dari Pemerintah Daerah sebagai pengelola keuangan publik sangat tinggi atau dapat dikatakan sudah sangat baik. Dengan kata lain, penilaian tingkat pengukuran kinerja, transparansi dan akuntabilitas public Pemerintah Daerah yang dilakukan oleh pihak eksekutif, pihak legislative dan pihak auditor diperoleh hasil bahwa tingkat pengukuran kinerja, transparansi dan akuntabilitas public dari Pemerintah Daerah (pihak eksekutif) sebagai pengelola keuangan public sangat tinggi atau dapat dikatakan sudah sangat baik. Tidak ada perbedaan antara kedua kelompok, artinya kedua kelompok tersebut yaitu pihak eksekutif dan pihak legislatif dan auditor sama-sama mengharapkan adanya pengukuran kinerja, dan transparansi serta akuntabilitas publik, dilihat dari equal variance assumed (diasumsi kedua varians sama). Ada perbedaan yang nyata di antara pihak eksekutif dan legislatif dan auditor

yaitu pihak eksekutif sebagai pihak yang menerbitkan pelaporan keuangan metniliki rata-rata kebutuhan informasi yang lebih tinggi dibanding pihak legislatif dan auditor sebagai pihak yang menerima pelaporan keuangan, dilihat dari equal variance not assumed (diastunsi kedua varians tidak sama).

Saran

Mengingat penelitian ini memiliki keterbatasan responden maka memungkinkan munculnya perbedaan yang signifikan antara rata-rata skor kebutuhan informasi dari pihak eksekutif maupun legislative dan auditor. Di samping itu, kurangnya respon pihak investor dan masyarakat yang diwakili oleh masyarakat pembayar pajak seperti perhotelan dan penginapan yang dapat menyebabkan adanya perbedaan hasil yang mungkin dapat menampakkan hasil yang kurang komprehensif. Oleh karena itu, diharapkan adanya perluasan responden untuk mencapai hasil yang maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, M. Sulaiman, 1996, Laporan Keuangan Sektor Publik, KNA III, Sernarang, 12-13 Septetnber.
- American Accounting Association, 1972, Repor of The Committee on Concepts of Accounting Applicable to The Public Sector 1970-1971, Accounting Review, Supplement Vol.XLVII.
- Azwar Syaifuddin, 2004, Penyusunan Skala Psikologi, Edisi I, Pustaka Pelajar.
- Bastian Indra, 2001, Akuntansi Sektor Publik di Indonesia, Edisi I, Yogyakarta, BPFE.
- Bergonovi, Ellio & Pessina, Eugonio Annesi, 1977, Accountability and Accounting in Public Administration: a Framework, the 6th CIGAR Conference of Local Government Accounting, Paris.
- Cranner, John and Rowan Jones, 1990, Accrual Accounting for National Government: The Case of Developing Countries: Research in Third World Accounting, Vol. 1, pp 103-113, JAI Press Ltd.
- Drebin, et., al., (1981), Objectives of Accounting and Financial Reporting for Governmental Units: A Research Study, NCGA, USA.
- Governmental Accounting Standard Board, (1987), Concepts Statement No. 1: Objectives of Financial Reporting, as quoted in Governmental Accounting Standards Series Statement No.34: Basic Financial Statements and Management's Discussion and Analysis for State and Local Government, Norwalk.
- Hyndrnan N. S., dan Anderson R., (1995), The Use of Performance Information in External Reporting: An Empirical Study of UK Executive Agencies, Journal of Financial Accountability & Management, February, p.1-17, England.
- Jones, R., Pendlebury, (1996), Public Sector Accounting, Fourth Edition, Pitman, London.
- Jones R., (1992), The Development of Conceptual Frameworks of Accounting for The Public Sector, Journal of Accountability and Management, Winter, p.249-264, England.
- Kurniawan, J. Lutfi, 2003, Diskusi Anggaran Publik, Malang Corruption Watch, Malang.
- Lembaga Administrasi Negara RI, (2000), Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Jakarta.
- Mardiasmo, 2002, Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah, Serial Otonomi Daerah, Andi, Offset, Yogyakarta.
- Mahmudi, 2002, Laporan Keuangan Sektor Publik Untuk Transparansi dan Akuntabilitas, Jurnal Pendidikan Akuntansi UNY, Edisi II.

, 2002, Laporan Keuangan Sektor Publik antara Konsep dan Praktik, Jurnal Akuntansi.

Patton, J.M., (1992), Accountability and Governmental Financial Reporting, Journal of Financial Accountability " and Management, Autumn, p.165-150, England.

Republik Indoensia, Undang-Undang No.28 tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. ,

Reporting: Intermediate Users and Indirect Control, Journal of Financial Accountability and Management, Winter, p.265-280, England.

, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Rutherford, B.A., (1992), Developing A Conceptual Framework for Central Government Financial

Siegel, Gary, dan Marcony, H.R., (1989), Behavioral Accounting, South-Western, Publishing Co., Cincinnati, Ohio.

Siregar, Baldric dan Bonni Siregar, 2001, Akuntansi Pemerintahan dengan Sistem Dana, Edisi Ketiga, Bagian Penerbitan , STIE, YKPN, Yogyakarta.

Whittaker, J.B., 1993, Government Performance Result Act, A Mandate for Strategic Planning and Performance Measurement, Washington DC, GAO.